

REPRESENTASI POLITISI PEREMPUAN DALAM EPISODE “POLITIKPEREMPUAN” DI PROGRAM MATA NAJWA TRANS 7

**Rahmawati Latief,¹, Sitti Asiqah Usman Ali², Wafiq Azizah
Ahyar³**

1,2,3, UIN Alauddin Makassar

Email: rahma.latief@gmail.com¹, asiqah.usman16@gmail.com²,
wafiqazizahahyar@gmail.com³

Abstrak:

Penelitian ini membahas mengenai partisipasi politisi perempuan dalam program televisi. Selama ini jumlah keterlibatan perempuan di dunia politik memang menunjukkan kemajuan yang menggembirakan tapi kondisinya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Terlebih ketika media massa tidak menampilkan dukungan melalui teknik reportase dan penulisan berita untuk menelisik peran perempuan dalam diskursus politik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui representasi politisi perempuan dalam program Mata Najwa Trans7. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis teks media model semiotika Roland Barthes dengan korpus tiga segmen dalam episode Politik Perempuan. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi. Setelah peneliti memperoleh data dari hasil dokumentasi, kemudian menganalisis data berupa teks dan gambar untuk mengetahui makna dibalik teks yang disampaikan host dan narasumber dalam program tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa representasi politisi perempuan yang terdapat dalam program Mata Najwa di Trans 7 pada episode “Politik Perempuan” tidak lepas dari ideologi dominan yaitu kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan yang direpresentasikan melalui narasumber yang hadir dalam program tersebut.

Abstract:

This study discusses the participation of women politicians in a television program. So far, the number of women involvement in politics has indeed shown encouraging progress but the conditions have not shown any significant changes. Especially when the mass media does not display support through reporting and news writing techniques to investigate women roles in political discourse. The purpose of this study is to determine the representation of women politicians in the program of Mata Najwa Trans7. This study used a qualitative approach with the method of media text analysis using semiotic model of Roland Barthes with three segment of corpus in the episode of women politic. The data collection method in this study is to use documentation techniques. After the researchers obtained the data from the documentation, then analyzed the data in the form of text and images to find out the meaning behind the text conveyed by the host and speaker in the program. The results of this research indicate that the representation of women politicians in the Mata Najwa program in Trans 7 in the episode "Women's Politics" is inseparable from the dominant ideology namely gender equality and women leadership represented by the speaker in the program.

Keywords: *Media, Politic, Semiotic, Women*

PENDAHULUAN

Dunia politik selalu identik dengan laki-laki, masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kental dengan budaya patriarki seperti perempuan tidak layak menjadi pemimpin, perempuan tidak boleh berkiprah di ranah politik. Kuatnya ideologi patriarki dalam masyarakat ini menimbulkan pemahaman dikotomistik tentang ruang publik dan ruang domestik. Bagi sebagian besar perempuan, politik kerap dipersepsikan sebagai ruang publik yang tabu bagi perempuan, pandangan bahwa laki-laki lebih layak dan lebih mampu untuk memimpin, membuat kebijakan, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat lekat dengan citra maskulin. Ideologi yang melekat dalam masyarakat ini, tentu menimbulkan banyak ketidakadilan atau bias gender yang terjadi di dalam masyarakat. Perempuan mempunyai hak yang sama dan sudah dijamin oleh undang-undang, partisipasi perempuan dalam dunia politik pada dasarnya merupakan perjuangan perempuan untuk memperoleh jumlah wakil yang memadai, dan akan memperjuangkan hak-hak perempuan.

Keterwakilan perempuan dalam menduduki jabatan politik di Indonesia masih sangat minim jumlahnya, meskipun sudah memiliki landasan hukum UU No 8/2012 yang mengatur tentang pemilihan umum anggota DPR RI, DPD dan DPRD. Salah satu butir pasal menyebutkan partai politik untuk memenuhi kuota 30 % calon legislatif (caleg) perempuan untuk berkontestasi dalam pemilu baik di DPR RI hingga DPRD tingkat II atau kabupaten/kota. Data hasil pemilu tahun 2004 jumlah anggota DPR RI perempuan sebanyak 11,82 %, dan di tahun 2009 meningkat menjadi 17,86%, sedangkan di tahun 2014 berjumlah 17,32% kemudian di tahun 2019 meningkat sebanyak 20,8 angka ini belum memenuhi kuota 30%. Jumlah perempuan di Indonesia sekitar 130 juta populasi hampir setara dengan kaum pria, keterwakilan perempuan belum terlalu memuaskan walaupun politik afirmasi perempuan sudah berjalan. Tanpa cukupnya keterwakilan perempuan dalam parlemen maka sudah dapat dipastikan bahwa kekuasaan perwakilan laki-laki jauh lebih dominan, baik yang berkaitan dengan pengambilan keputusan politik yang umum bahkan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam kehidupan politik akan mempunyai banyak keuntungan bagi masyarakat. Jumlah perempuan yang cukup dalam institusi

pengambilan keputusan akan membuat pergeseran cara pandang dalam menyelesaikan masalah-masalah politik dengan mengutamakan perdamaian dan cara-cara anti kekerasan. Selain itu, akan menghasilkan perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang dapat memasukkan kebutuhan khusus perempuan terhadap anak, kelompok lanjut usia dan tuna daksa, dan isu-isu kekerasan seksual. Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik juga dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat seperti diskriminasi di tempat kerja dan di hadapan hukum. Dalam perkembangannya hal ini tentu sangat berimplikasi pada hubungan antara media massa dan perempuan. Media massa sebagai sebuah wadah yang sangat kuat dalam menggiring opini masyarakat, namun permasalahan gender selalu dikonstruksi dalam sistem kekuasaan yang patriarki menggunakan ruang publik (media massa).

Hubungan antara media dan perempuan telah banyak dijelaskan dalam hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perempuan dalam media massa sering direpresentasikan berbeda dengan realitas sosial yang terjadi seperti dalam area politik. Menurut *Women Research Institute* proporsi perempuan dalam parlemen di seluruh dunia baru mencapai 18 % (www.wri.or.id). Selain itu, data dari Pengajar Jurnalisme Indonesia (SJI), Saur Hutabarat menilai pers yang masih mendahulukan budaya kesetaraan gender dalam liputan berita tentang politisi perempuan cenderung stereotip, menimbulkan pemberitaan yang tidak berimbang (www.republika.co.id). Politisi perempuan seringkali harus berjuang untuk diliput oleh media. Selain itu, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator, Rustika Herlambang, mengemukakan media online di Indonesia selama tahun 2014 hingga April 2015, hanya menyorot *figure* perempuan sebanyak 4% (Erry, 2013:11).

Partisipasi politik perempuan tidak saja dilakukan dengan memberikan hak pilih, tetapi juga dilakukan dengan cara perempuan mencalonkan diri dalam dunia politik. Selama ini jumlah keterlibatan perempuan di dunia politik memang menunjukkan kemajuan yang menggembirakan tapi kondisinya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Terlebih ketika media massa tidak menampilkan dukungan melalui teknik reportase dan penulisan berita yang menelisik perempuan dalam diskursus politik. Media massa sebagai sarana pemberi edukasi dan informasi memegang fungsi sebagai kontrol sosial, dimana tidak hanya memiliki kewajiban

untuk menyajikan fakta tetapi juga memiliki kewajiban untuk menyeleksi isi pemberitaannya sehingga tidak menimbulkan bias di dalam berita yang dihasilkan.

Media massa seringkali abai terhadap isu-isu perempuan atau permasalahan gender lainnya. Ini tentu sangat berdampak pada representasi perempuan yang ditampilkan dalam media massa. Media harusnya memprioritaskan kepentingan publik dalam mencari informasi untuk diberitakan. Semisal dalam pemberitaan yang berkaitan dengan politik sebaiknya media menyorot pemilih rentan, seperti pemilih pemula, perempuan, lansia, kelompok masyarakat miskin dan lain-lain. Agar para calon biasa memasukkan visi misinya dalam agenda politik. Sedikit sekali media yang menampilkan representasi perempuan berdasarkan prespektif perempuan dalam dunia politik. Program Mata Najwa dalam episode "Politik Perempuan" mengangkat isu gender dan politik dengan sudut pandang yang berbeda, di mana seluruh tamu dalam program ini adalah perempuan dengan latar belakang politik yang berbeda.

Dengan melihat alasan di atas penulis melihat program Mata Najwa dalam episode "Politik Perempuan" memberikan ruang dan kesempatan bagi politisi perempuan untuk unjuk diri dalam dunia politik, membahas isu-isu penting dalam negeri dan mampu memberi edukasi politik pada masyarakat bahwa, baik perempuan maupun laki-laki memiliki posisi yang sama dalam pengambilan kebijakan publik.

TINJAUAN PUSTAKA

Gender, Budaya Patriarki dan Perempuan dalam Dunia Politik

Gender merupakan perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil rekonstruksi sosial dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Gender lebih menekankan pada sikap, perilaku, dan peran yang menempel pada pria atau perempuan berdasarkan konstruksi sosial. Sedangkan seks atau jenis kelamin mengacu pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan atau perbedaan secara kodrati yang tidak bisa diubah sejak lahir. Gender secara harfiah sering diartikan dengan perbedaan seks antara laki-laki dan perempuan. Pembahasan tentang gender lebih dari sekedar perbedaan seks, tapi gender membahas perbedaan sifat antara laki-laki dan perempuan dapat dipertukarkan dan dapat berubah menurut waktu dan tempat, juga merupakan

rekayasa sosial tidak bersifat universal dan memiliki identitas yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, agama, etnik, adat istiadat, golongan, juga faktor sejarah, agama, serta pertahanan keamanan.

Gender merupakan interpretasi biologis oleh kultur, ajaran nenek moyang, atau hasil persetujuan dari sebuah komunitas atau dalam masyarakat, hubungan gender berubah seiring dengan perkembangan sosial budaya yang dikonstruksikan untuk mendukung kehidupan manusia. Perbedaan laki-laki dan perempuan berlandaskan hubungan gender dimaknai secara berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu budaya ke budaya yang lain, dan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh dari perwujudan konsep gender sebagai sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial dan budaya. Gender sering disalahpahami sebagai kodrat, padahal konsep gender merupakan sosial budaya yang dikonstruksi masyarakat (Soekanto, 2006: 61). Persoalan gender ini juga tidak lepas dari budaya patriarki yang merupakan ideologi dominan di negara-negara berkembang.

Budaya patriarki sebagai bagian yang tak terpisahkan dari diskursus tentang gender dan kesetaraan perempuan. Patriarki sebenarnya sebuah konsepsi yang amat tua, hadir karena adanya stigma atau prasangka lebih tepatnya konstruksi sosial di masyarakat mengenai laki-laki dan perempuan dilihat secara abstrak dan sangat kasar. Istilah patriarki adalah istilah yang merujuk pada nilai-nilai atau sebuah sistem atas dasar ke-bapak-an atau boleh dibilang nilai-nilai yang menitikberatkan pada laki-laki sebagai unsur utama yang dalam suatu keluarga. Patriarki biasanya terjadi karena terdapat pandangan atau pemahaman tentang gender yang salah sehingga membuat laki-laki dipandang dan dianggap jauh lebih hebat dibanding perempuan. Anggapan tersebut membuat perempuan tersubordinasi atas laki-laki dan melahirkan patriarki, sederhananya ketidakadilan dalam gender nantinya akan berujung pada tumbuhnya patriarki secara luas di masyarakat.

Budaya patriarki dibedakan dalam dua bentuk yakni patriarki privat dan patriarki publik, patriarki privat biasanya terdapat pada rumah tangga, dimana kepala keluarga (laki-laki) memiliki andil yang lebih besar dari pada perempuan dalam urusan kebijakan atau keputusan yang menyangkut urusan rumah tangga, sistem patriarki privat mengeksploitasi perempuan dengan tidak mengizinkan istri memasuki ruang publik, dalam hal ini bekerja (Walby, 2014:28) . Tetapi tetap

terdapat pemisahan dan eksploitasi pada perempuan, semisal upah yang tidak sama dengan laki-laki, atau penghargaan yang tidak sama dengan laki-laki. Ketidakadilan yang dirasakan perempuan pada akhirnya melahirkan gerakan perempuan atau dikenal dengan feminisme. Gerakan ini bertujuan untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender bagi perempuan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan hukum. Gerakan ini melahirkan kajian perempuan yang mencoba mengangkat perempuan-perempuan ke permukaan sehingga keadilan dan kesetaraan gender secara struktural dan kultural dapat diwujudkan. Gerakan ini juga menyentuh aspek politik yang seringkali diasumsikan sebagai aspek maskulin dalam dunia perempuan.

Sejarah tentang perempuan yang mulai sensitif dalam menyuarakan hak-haknya bahkan menuntut partisipasi yang lebih dalam bidang politik mulai sekitar tahun 1848, ketika itu perwakilan perempuan seluruh dunia sebanyak kurang lebih 300 orang, berkumpul dan mengadakan konvensi dalam pertemuan Seneca Falls untuk mempertanyakan hak-hak perempuan dan kurangnya partisipasi perempuan dalam ranah politik. Beberapa tahun kemudian, partisipasi perempuan dalam ruang publik mulai didengungkan kembali, diadakan di Selandia Baru pada tahun 1894 yang memberikan hak perempuan dalam memilih, disusul oleh Australia kemudian Finlandia dan Norwegia 20 tahun setelahnya (Arivia, 2006: 6). Di Indonesia sendiri partisipasi perempuan dalam hak pilih sudah ada sejak pemilu pertama pada tahun 1955. Walaupun perempuan dibolehkan dalam hal memilih namun tak serta merta juga keberadaan perempuan dalam pemerintahan baik eksekutif dan legislatif setara dengan laki-laki. Gerakan perempuan pada masa orde lama dan orde baru hanya sebatas emansipasi dalam artian perempuan hanya memperjuangkan hal-hal formal seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Barulah tahun 90-an gerakan perempuan di Indonesia mulai berubah menyoroti hal-hal yang bersifat kesetaraan gender seperti representasi perempuan dalam ruang publik khususnya politik (Masykur, 2017: 3).

Budaya politik terhadap eksistensi perempuan di ranah politik selama ini belum memberikan diskursus yang positif. Ini karena posisi dan peran tradisional perempuan di ranah domestik lebih mengedepan dibandingkan posisi atau kedudukan di ranah publik. Perempuan dalam dunia politik tentu mempunyai banyak keuntungan bagi masyarakat. Perempuan diperlukan suaranya atau pendapatnya pada tahap menyusun atau penggodokan kebijakan utamanya yang menyangkut

anak-anak dan perempuan itu sendiri.

Wajah Politisi Perempuan di Media Massa

Media massa sering kali menggunakan 'wajah' perempuan sebagai objeknya. Hal tersebut tidak dapat dihindari mengingat ketatnya persaingan antar media saat ini. Hal tersebut menyebabkan ketidakseimbangan bagi citra perempuan yang digambarkan oleh media massa, baik itu dalam konteks hiburan, isu sosial, atau politik. Dalam konteks politik sendiri, media massa seringkali menempatkan politisi perempuan dalam dua standar. Pertama, jika seorang politisi perempuan tangguh dan konsisten dalam menyampaikan ide-ide politiknya maka politisi perempuan tersebut akan dianggap melenceng dari kodrat femininnya. Sedangkan standar yang kedua adalah jika politisi perempuan memperlihatkan emosinya maka politisi perempuan tersebut akan dianggap memanfaatkan sisi keperempuanannya demi mendapatkan simpati masyarakat. Media massa juga sering kali lebih tertarik mengulik kehidupan pribadi seorang politisi perempuan ketimbang prestasi-prestasi politiknya (Subiakto, 2012: 185). Citra politisi perempuan yang digambarkan oleh media massa tentu saja berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap kinerja politisi perempuan mengingat betapa kuatnya pengaruh media massa dalam membentuk opini publik. Menurut Hetifah Sjaifudin yang merupakan anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, dalam harian KOMPAS tercatat 62,5 % masyarakat Indonesia yang tidak puas dengan kinerja politisi perempuan (Ardani, 2016: 40). Tidak menutup kemungkinan hal itu menyebabkan politisi perempuan menjadi tidak percaya diri karena merasa lebih rentan terhadap sorotan media publik. Politisi perempuan butuh tenaga yang lebih untuk mendapat pengakuan dari kinerjanya. Persoalan representasi perempuan di media, yang memiliki sensitivitas gender dan jurnalisme yang memiliki keberpihakan, pada dasarnya bermuara pada sejauh mana akses perempuan pada media massa. Konferensi tingkat dunia tentang perempuan IV di Beijing, China pada tahun 1995 merumuskan rekomendasi 12 bidang kritis sebagai sarana-sarana strategis yang harus dipenuhi negara, isi rekomendasi tersebut antara lain : 1). Meningkatkan partisipasi dan kesempatan perempuan untuk berekspresi dan mengambil keputusan di dalam dan melalui media massa serta teknologi-teknologi komunikasi yang baru. 2). Memajukan gambaran-gambaran yang seimbang dan tidak klise tentang perempuan dalam media.

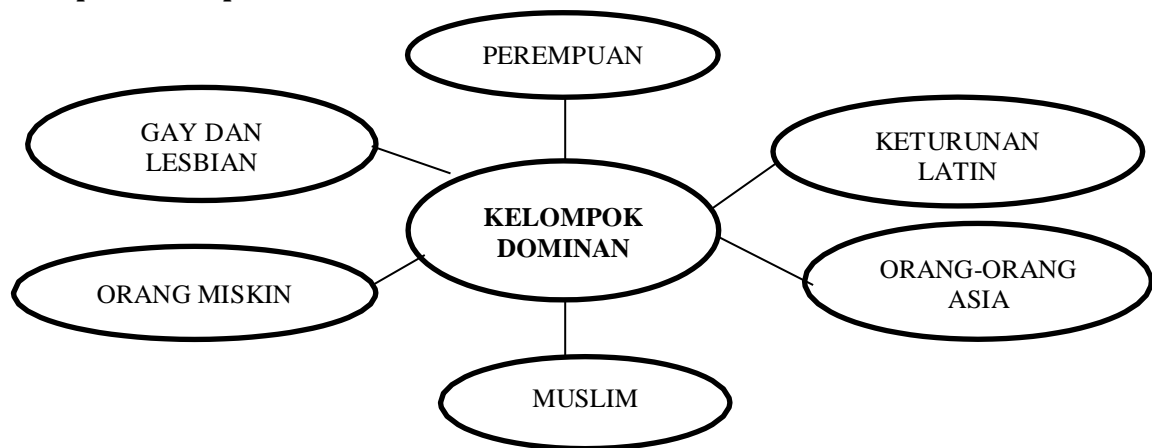
Media massa memang memiliki peranan yang besar dalam mengkonstruksi masyarakat sehingga gambaran tentang perempuan yang muncul di media jika tidak dikritisi akan dianggap natural, wajar, dan bahkan begitulah adanya. Padahal jika saja akses perempuan terhadap media tidak terbatas, banyak yang bisa dilakukan oleh mereka yang kritis terhadap identitas dan representasi perempuan dalam media, keterbatasan akses membuat perempuan menjadi terpinggirkan.

Standpoint Theory

Teori *standpoint* atau disebut juga sebagai teori sikap merupakan sebuah teori yang dapat mengubah kekuasaan seseorang melalui kewenangan suara pribadi individu. Teori *standpoint* pertama kali di pelopori oleh filsuf Jerman bernama Georg Wilhelm Friedrich Hegel pada tahun 1807. Ia mengemukakan bahwa teori ini membahas tentang gabungan antara tuan dan budak hidup dalam ruang lingkup yang sama, tetapi mereka memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda. Hal tersebut disebabkan karena posisi mereka berbeda dalam kehidupan sosial. Hegel berpendapat bahwa meskipun budak dan tuan tinggal pada lingkungan yang sama, namun pengetahuan mereka akan berbeda. Perbedaan ini disebabkan karena posisi mereka di dalam kondisi sosial yang memang sudah berbeda.

Standpoint theory ini kemudian dikembangkan oleh Nancy Harstok. Menggunakan ide-ide dari Hegel dan Karl Marx untuk kemudian mengadaptasi teori *Standpoint* untuk menguji hubungan antara laki-laki dan perempuan (Setiawan, 2014: 170). Selain itu teori *standpoint* dapat digunakan untuk menganalisis berbagai sikap berdasarkan ras, kelas, politik dan status ekonomi, menempatkan kita pada suatu titik tertentu dan menentukan cara pandang setiap individu. Kerangka ini dibangun atas dasar pengetahuan yang dihasilkan dari kehidupan sehari-hari (Perdana, 2012: 21).

Kelompok Standpoint Teori



Sumber : Suara Perempuan di Media Cetak Sebagai Komunikasi Politik (Perdana, 2018)

Teori *standpoint* menjadi populer dikalangan penelitian komunikasi karena memiliki hubungan dimana komunikasi bertanggung jawab dalam posisi membentuk sudut pandang saat berjuang dan mempertahankan argumentasinya dalam pembelajaran tentang keberadaan individu pada lingkungan sosial melalui interaksi dengan individu lainnya. Teori ini pun mampu mengubah *status quo* dan menciptakan sebuah perubahan dengan memberikan suara bagi kelompok yang suaranya jarang didengar, semua konsepnya berakar dari komunikasi (Perdana, 2012: 21). Teori *standpoint* mengilustrasikan kesentralan komunikasi baik dalam membentuk dan menyalurkan sikap, selain itu, teori ini menunjuk pada kegunaan komunikasi sebagai alat dalam mengubah *status quo* dan menghasilkan perubahan (Setiawan, 2014: 171). Dengan memberikan suara bagi mereka yang pandangannya jarang didengar, metode-metode yang dihubungkan dengan teori ini berfokus pada praktik-praktik komunikasi. Sedangkan asumsi teori *standpoint* menurut Saltzman Chafets:

- a. Jenis kelamin atau gender atau gender merupakan fokus utama teori ini
- b. Hubungan jenis kelamin atau gender dipandang sebagai suatu yang problematis
- c. Teori ini berusaha untuk bagaimana jenis kelamin atau gender dipandang sebagai sesuatu yang dapat diubah.
- d. Teori feminis dapat digunakan untuk menentang status quo ketika status quo ini merendahkan atau melecehkan wanita.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode

analisis teks media dengan pendekatan analisis semiotika Roland Barthes yang terdiri dari tiga tingkatan pertanda yaitu, denotatif, konotatif, dan mitos. Gagasan Roland Barthes ini dikenal dengan denotasi (makna sebenarnya) dan konotasi (kultural dan personal), dan mitos (merupakan lapisan pertanda dan makna yang paling dalam). Subjek penelitian ini adalah program acara *talkshow* Mata Najwa episode Politik Perempuan di Trans7. Pemilihan episode ini didasarkan dari hal menarik yang mendapat perhatian khusus peneliti. dalam episode ini narasumber membahas berbagai isu-isu gender dan politik dengan sudut pandang yang berbeda, dimana seluruh tamu dalam program ini adalah perempuan dengan latar belakang politik yang berbeda. Di episode ini Najwa Shihab sebagai *host* mencoba untuk mengulik model sudut pandang para perempuan yang mewakili partai pendukung masing-masing pendukung capres-cawapres terkait isu perempuan, seperti isu ekonomi, ketimpangan gender dan rendahnya keterwakilan perempuan dalam struktur lembaga perwakilan Indonesia.





Program Acara televisi Mata Najwa episode "Politik Perempuan" ditayangkan oleh stasiun televisi Trans7 pada tanggal 6 November 2018 pukul 20.00 – 21- 30 WIB. Dalam episode ini terdapat 7 segmen menghadirkan 6 politisi perempuan, 3 politisi dari kubu Jokowi - Ma'ruf Amin, dan 3 politisi dari Prabowo-Sandi. Narasumber dalam episode ini ialah Dwi Ria Latifa merupakan politisi dari Partai PDIP (Partai Demokrasi Perjuangan), Ida Fauziah politisi dari partai PKB (Partai Kebangkitan bangsa) dan saat ini menjadi Menteri ketenagakerjaan di kabinet Jokowi-Ma'ruf, dan Tina Talisa politisi dari Partai Nasdem (Nasional Demokrat), Neti Prasetyani politisi dari partai PKS (Partai Keadilan Sejahtera), Edriana politisi dari partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), dan Firliana Purwanti, politisi partai Demokrat.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah berdasarkan pada *scene* yang ada di dalam program televisi ini, tetapi tidak semua *scene* diteliti melainkan hanya *scene-scene* tertentu yang dianggap peneliti telah mewakili pemunculan adanya pesan-pesan yang dapat dimaknai sebagai representasi politisi perempuan di dalamnya. Dalam penelitian ini *scene* yang diambil hanya *scene* tertentu yang peneliti anggap telah mewakili adanya pemunculan pesan-pesan yang dapat dimaknai sebagai representasi perempuan didalamnya yakni di segmen pertama setelah *opening scene*. *Host* memperkenalkan narasumber-narasumber yang hadir, setelah itu Najwa Shihab menanyakan bagaimana para narasumber melihat kedua Capres dan Cawapres mana

yang lebih menarik hati pemilih perempuan, kemudian di segmen keenam membahas isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian terakhir dalam segmen ketujuh yang mana Najwa Shihab memberikan kesempatan para narasumber untuk berkampanye dan mengajak pemirsa untuk memilih caleg perempuan.

HASIL DAN DISKUSI

Unsur-Unsur Analisis Segmen Pertama

<i>Durasi</i>	<i>Visual</i>	<i>Type of shoot</i>	<i>Gesture</i>
07.34		<i>Medium shot</i> , Pada jarak ini objek diperlihatkan dari bagian pinggang sampai kepala.	Najwa bertanya kepada Netty apakah Prabowo Sandi yang lebih peduli terhadap isu perempuan.
08.13		<i>Medium shot</i> , Objek di perlihatkan dari pinggang hingga kepala dan ruang kosong di sisi kiri, untuk infografis profil.	Netty menjawab pertanyaan yang diajukan Host.
08.57		<i>Long shot</i> , menyajikan tampilan seluruh objek dengan latar belakang yang lebih luas.	Host dan narasumber mendengarkan dengan seksama.
09.58		<i>Long shot</i> , objek penonton dalam studio MataNajwa.	Tepuk tangan penonton saat narasumber selesai menjawab pertanyaan.

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Analisis denotasi dari segmen ini adalah Najwa Shihab memberikan kesempatan kepada Netty Prasetyani sebagai Direktur Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Tim Prabowo-Sandi, untuk menyampaikan kepada calon pemilih alasan Prabowo-Sandi memiliki perhatian lebih terhadap isu perempuan. Dalam segmen ini suasana mulai terbentuk saat Netty menanggapi pernyataan dari Ida Fauziyah disusul tepuk tangan dari penonton yang hadir dalam studio (*long shot*) untuk menunjukkan antusias narasumber dan penonton terhadap isu yang sedang dibahas. Analisis konotasi yang terdapat dalam bagian ini adalah *host* dan narasumber mengangkat isu perempuan yang sangat dekat dengan urusan domestik mulai bergeser dengan pandangan perempuan dapat berkarir dengan urusan publik dan domestik. Perempuan dapat memilih pekerjaan dan meningkatkan kapasitasnya untuk meniti jenjang karir yang lebih tinggi. Perempuan juga dapat memilih semua potensi, apa yang disukai dan apa yang tidak disukai. Kesempatan ini banyak digunakan perempuan untuk mengaktualisasikan diri ke ranah yang lebih produktif. Tidak sedikit pula perempuan bekerja karena terdesak tuntutan ekonomi bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Sementara kemiskinan perempuan di yakini dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup dan partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi dan pembangunan. Pemberdayaan perempuan diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan menghapus permasalahan kemiskinan secara perlahan. Salah satu upaya terpenting yang perlu dilakukan adalah memberi perlindungan yang layak bagi wanita pekerja dan pemenuhan hak-haknya sebagai pekerja.

Dalam segmen pertama ini peneliti menemukan mitos berupa ideologi kesetaraan gender yang mana isu pemberdayaan ekonomi perempuan mendapatkan porsi cukup besar dalam pembicaraan talk show. Isu ini merupakan yang isu yang sangat penting untuk dibahas menjelang pemilihan umum. Simbol yang sangat menonjol ialah peranan politik elit dalam memajukan ekonomi masyarakat khususnya perempuan. Dalam isu gender dan kemiskinan, rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Ketidaksetaraan di dalam alokasi sumberdaya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan berbeda. Di ruang publik, kemiskinan perempuan selalu dikaitkan dengan tertutupnya ruang-ruang partisipasi

perempuan dalam pengambilan keputusan yang sifatnya formal bagi perempuan. Persoalan lain yang dihadapi perempuan adalah pembangunan disegala bidang seringkali belum berpihak pada perempuan padahal jika ditelisik lebih jauh perempuan merupakan aset berharga dalam proses pembangunan bangsa, dengan kata lain keberhasilan ekonomi pembangunan ditentukan pula oleh kualitas pemberdayaan kaum perempuan.

Unsur-Unsur Analisis Segmen Keenam

<i>Durasi</i>	<i>Visual</i>	<i>Type of Shoot</i>	<i>Gesture</i>
01:10:50		<i>Medium close up</i> , jarak ini objek diperlihatkan dari dada hingga kepala.	Ketika Netty di minta memberikan tanggapan oleh <i>host</i> .
01:11:00		<i>Long shot</i> , pada jarak ini menampilkan objek secara keseluruhan.	Ketika Firliana memberikan tanggapan, kemudian narasumber lain menyimak.
01:11: 40		<i>Medium shot</i> , menampilkan 3 objek dari pinggang hingga kepala.	Ida Fauziyah memberikan komentar terkait pernyataan dari Firliana.
01:12:10		<i>Medium close up</i> , menampilkan objek dari dada hingga kepala.	Ketika Firliana mengomentari pemerintahan Jokowi-JK.

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Analisis denotasi berikutnya yaitu ketika Netty Prasetyani diminta oleh *host* untuk memberi tanggapan terkait dengan perbedaan angka kekerasan dan kematian

ibu dan anak, antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Netty kemudian menanggapi bahwa ia tidak ingin terlibat dengan angka, karena angka dan kondisi di lapangan sangat berbeda.

Kemudian Firliana menanggapi dengan pengambilan gambar *long shot* untuk menunjukkan suasana keseluruhan, sekaligus menunjukkan keseriusan narasumber menyimak perbincangan Ida Fauziyah kemudian menanggapi kembali pernyataan Firliana dengan pengambilan gambar *medium shot* memperlihatkan posisi duduk Ida Fauziyah berada di tengah antara Dwi Ria Latifa dan Tina Talisa. Dan *shot* terakhir ketika Firliana Purwanti menyoroti pemerintahan Jokowi - Jk dengan pengambilan gambar *medium close up*. Dalam segmen ini, pengambilan gambar *medium close up* lebih mendominasi untuk memudahkan dalam mengamati reaksi narasumber saat berbicara, untuk mengukur dan melihat keseriusan mereka (politisi perempuan) dalam menyoroti isu seperti pernikahan dini, pendidikan perempuan dan kemiskinan perempuan. Makna konotasinya dari segmen di atas adalah munculnya berbagai dampak negatif dari pernikahan dini yang terjadi di masyarakat salah satunya adalah tercurinya hak seorang anak. Antara lain hak pendidikan, dan hak untuk hidup bebas dari kekerasan, dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi. Rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan finansial, juga akan berdampak pada langgengnya garis kemiskinan. Firliana mencoba memberikan pandangannya bahwa pendidikan merupakan solusi dari angka pernikahan dini yang semakin meningkat.

Sedangkan analisa mitos dalam segmen ini politisi perempuan menekankan terpenuhinya hak perempuan dan mengakhiri segala bentuk diskriminasi, kekerasan, seperti pernikahan dini yang merupakan praktik-praktik berbahaya yang sering dialami oleh perempuan.

Politisi perempuan dalam segmen ini juga menyoroti peran pemerintah dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan yang tidak bisa diwujudkan hanya dengan ajakan retorik. Tugas mengurangi kekerasan adalah tanggungjawab pemerintah dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan yang melindungi perempuan dan anak, dan partisipasi dari berbagai elemen masyarakat.

Unsur-Unsur Analisis Segmen Ketujuh

<i>Durasi</i>	<i>Visual</i>	<i>Type of Shoot</i>	<i>Gesture</i>
01:15:39		<i>Long shot</i> , menampilkan objek secara keseluruhan dengan latar belakang yang lebih luas.	Reaksi kegembira narasumber ditunjukkan dengan bertepuk tangan ketika diberi kesempatan oleh untuk berkampanye.
01:16:04		<i>Medium close up</i> , menampilkan objek dari dada hingga kepala.	Netty ketika mulai berkampanye.
01:17:19		<i>Medium close up</i> , menampilkan objek dari dada hingga kepala.	Dwi Ria sedang mendeskripsikan kelebihan politisi perempuan.
01:17:49		<i>Medium close up</i> , menampilkan objek dari dada hingga kepala.	Ketika Edriana sedang menjelaskan budaya <i>bundo kandung</i> .

Sumber : Data Olahan Peneliti, 2020

Dalam segmen ini *host* memberi kesempatan kepada 5 narasumber, dimana narasumber yang hadir kecuali Ida Fauziyah untuk mengkampanyekan dirinya agar dipilih dalam pilkada serentak 2019. Peneliti hanya mengambil dialog dari 3 politisi perempuan untuk dianalisis yakni Dwi Ria Latifa, Netty prasetyani, dan Edriana. Dalam segmen 7 ini, Analisis dimulai di durasi 01:15:29 ketika *host* memberikan kesempatan kepada Netty Prasetyani untuk berkampanye dan menyapa konsituen dengan pengambilan gambar *long shot* menampilkan objek secara keseluruhan pengambilan gambar ini bertujuan untuk menunjukkan reaksi narasumber ketika diberi kesempatan untuk kampanye oleh Najwa Shihab. Ketika Netty berbicara

tampak pengambilan gambar *medium close up*, kemudian narasinya di tutup dengan pernyataan “*perempuan harus berdaya karena ketika perempuan berdaya dia akan mampu memberdayakan dan tidak mudah diperdaya*” disusul tepuk tangan riuh dari penonton di studio Mata Najwa. *Host* kemudian memberikan kesempatan yang sama kepada Dwi Ria Latifa, dengan pengambilan gambar *medium close up*, diawali dengan memberikan deskripsi tentang kelebihan yang dimiliki perempuan. Selanjutnya *host* memberikan kesempatan kepada Edriana untuk berkampanye dengan pengambilan gambar *medium close up* Edriana memulai kampanyenya dengan menjelaskan *bundo kanduang*, budaya sosial Sumatra Barat garis keturunan berdasarkan ibu, dan mengaitkan kultur tersebut pada budaya dan peran perempuan dalam dunia politik. Dalam segmen ini pengambilan gambar *medium close up* pada narasumber lebih mendominasi, hal ini bertujuan untuk menunjukkan *gesture* dan mimik wajah politisi perempuan untuk meyakinkan pemirsa untuk menggunakan hak pilihnya dan memilih caleg perempuan dalam pemilu serentak 2019.

Adapun analisis konotasinya yang ditemukan dalam segmen tersebut adalah dalam dunia politik perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama dalam berkontestasi dalam pemilihan umum. Hak untuk menyuarakan aspirasinya dan hak untuk berjuang membawa mandat dari masyarakat, selain itu *host* dan politisi perempuan ingin menunjukkan bahwa tidak ada batasan bagi perempuan, perempuan juga berhak melakukan tindakan atas kebijakan di berbagai bidang kehidupan terutama dalam bidang politik. Budaya patriarki yang kental dalam masyarakat membuat perempuan kerap dipandang sebelah mata dan dianggap sebagai pelengkap untuk memenuhi kouta partai politik saja, stigma tersebut berusaha dilawan oleh politisi perempuan, mereka menyadari bahwa perempuan dalam dunia politik butuh perjuangan lebih untuk memperjuangkan kemajuan kaum perempuan di Indonesia.

Di posisi lain, mitos yang terdapat dalam segmen ini adalah kepemimpinan perempuan dan kesetaraan gender dalam keterwakilan perempuan di bidang politik yang selalu didorong, memberikan dukungan dan kepercayaan kepada politisi perempuan sebagai sumber daya manusia yang memiliki potensi yang tinggi, sebab peran perempuan sangat dibutuhkan baik dalam urusan domestik dan publik. Keterwakilan perempuan dalam politik diperlukan agar mampu berjuang bersama-sama dengan laki-laki untuk keseimbangan peran. Sayangnya paradigma perempuan

masih dianggap sebagai figuran, perempuan terkadang harus berjuang lebih keras kalah berkiprah di lingkungannya terlebih dalam dunia politik.

Representasi Politik 'Perempuan' Dalam Tradisi Roland Barthes

Tulisan ini menggunakan metode semiotika dari Roland Barthes yang mencoba merepresentasikan politisi perempuan digambarkan dalam program Mata Najwa episode "Politik Perempuan" dengan menggunakan tingkatan analisis makna denotasi, konotasi dan kemudian berkembang menjadi mitos.

Bedasarkan hasil pengamatan dan penelusuran dalam program Mata Najwa dengan model analisis semiotika Roland Barthes, bahwa apa yang ditampilkan dalam program tersebut tidak terlepas dari realitas sosial yang ada, jika merujuk pada teori konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman bahwa realitas sosial yang terbungkus dalam tayangan *talkshow* tersebut telah berproses secara simultan artinya ada proses menarik keluar (eksternalisasi) sehingga seakan-akan itu berada di luar (objektif) dan kemudian ada proses penarikan kembali ke dalam (internalisasi) suatu pemahaman atau penafsiran yang langsung dari sebuah peristiwa objektif sebagai suatu pengungkapan makna, sehingga sesuatu yang terdapat diluar seakan-akan berada dalam diri atau kenyataan subjektif. Sehingga pemahaman akan sebuah realitas yang dianggap objektif pun akan terbentuk, melalui proses eksternalisasi dan objektifikasi individu dibentuk sebagai produk sosial. Sehingga dikatakan bahwa setiap individu memiliki pengetahuan dan identitas sosial sesuai dengan peran institusional yang telah terbentuk atau diperankannya. Akhirnya tanpa disadari pemirsa atau khalayak yang menonton program tersebut berupaya menyesuaikan diri dengan nilai-nilai yang ditampilkan dalam televisi. Berikut representasi politisi perempuan berdasarkan hasil analisis dari peneliti:

Pertama, secara keseluruhan, tayangan Mata Najwa membahas tentang isu-isu penting yang berkaitan dengan perempuan. Ideologi kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan dalam program ini muncul secara dominan, kesetaraan gender merujuk pada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajiban dalam berbagai aspek kehidupan baik dalam urusan domestik dan publik, sama halnya dengan kepemimpinan perempuan yang tidak terbatas dalam kehidupan rumah tangga, tapi juga dalam masyarakat (publik).

Kedua, perempuan digambarkan sebagai sosok yang cerdas, berani menyatakan sikap, menyampaikan pendapat untuk memperjuangkan hak-hak perempuan yang belum terpenuhi agar terhindar dari berbagai tindakan diskriminasi dan kekerasan terdapat dalam segmen keenam. Ketika politisi perempuan menyuarkan hak perlindungan terhadap perempuan yang mengalami kekerasan, dan perlindungan terhadap hak anak-anak. hal ini di perkuat oleh *standpoint* teori. Teori yang mampu mengubah *status quo* dan menciptakan sebuah perubahan dengan memberikan suara bagi kelompok yang suaranya jarang didengar, konsepnya yang berakar dari ilmu komunikasi teori ini juga di perkuat oleh tayangan yang menampilkan politisi dari kubu Prabowo-Sandi yakni Netty Prasetyani, Edriana dan Firliana Purwanti sebagai politisi yang sangat kritis terhadap kebijakan-kebijakan dalam pemerintahan Jokowi-JK, sehingga membangun realitas bahwa perempuan mempunyai hak yang sama dengan laki-laki untuk bersuara mewakili kaum minoritas, dan memberikan masukan terhadap segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Ketiga, menampilkan potensi perempuan sebagai komunikator politik, yang mampu mengkomunikasikan agenda-agenda dan visi politiknya serta mendukung pemberdayaan perempuan agar dapat bangkit dan bekerja menggunakan segala potensi yang dimiliki oleh perempuan. Dalam tataran individu perempuan berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, perekonomian yang memadai, partisipasi terhadap sumber daya yang memadai, dan memperoleh perlindungan hukum dan lain-lain. Maka dari itu, kesetaraan gender dalam politik di Indonesia merupakan hal yang layak untuk diperjuangkan. Selain potensi dan prestasi yang dimiliki oleh perempuan yang selama ini tidak dapat berkompetisi karena stigma patriarkis, dunia politik juga seharusnya menjadi tempat untuk partisipasi aktif bagi calon-calon yang memiliki tanggung jawab untuk memajukan bangsa tidak terlepas dari gender atau ras namun di lihat dari kualitas dan kapabilitas.

Keempat, peran perempuan dalam politik sebagai salah satu kesetaraan gender dimana laki-laki berada diposisi yang sama. Hadirnya perempuan dalam keterwakilan politik sebagai bentuk emansipasi wanita sebagai bagian dari bangsa dan negara yang turut serta dalam memperjuangkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirnya perempuan dalam keterwakilan politik juga bukan untuk mendikte

laki-laki atau anti terhadap laki-laki melainkan perempuan dan laki-laki memiliki bagian yang seimbang dan berimbang dalam politik, namun perempuan tidak melupakan hakekat mereka sebagai istri dan ibu sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa perempuan dalam politik dan kesetaraan gender harus seimbang dan berimbang tanpa melupakan hakekat dan kodratnya. Meski secara realitas perpolitikan di Indonesia masih terjadi bias gender karena masyarakat masih sangat kental dengan budaya patriarki dimana politisi laki-laki jauh lebih dominan, hal ini tentu menyebabkan keterwakilan perempuan belum terlalu memuaskan walaupun aturan tentang kouta 30 % bagi caleg perempuan sudah diterapkan, tapi kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat pengambilan kebijakan sulit dibendung. Praktik politik patriarkis menjadi tradisi dan budaya yang diwariskan turun temurun, kemudian dianggap sebagai sesuatu yang wajar *Mindset* yang cenderung merendahkan perempuan dan lawan politik yang lebih populer cenderung memaksa kandidat perempuan untuk menjadi komunikator yang lebih baik dan menunjukkan lebih banyak empati untuk mendapat dukungan.

Keterwakilan perempuan dalam parlemen meski sudah mengalami peningkatan tetapi jumlahnya tidak pernah mencapai 30%. Hal ini menyebabkan sulitnya menetapkan kebijakan-kebijakan yang adil terhadap perempuan. Kesulitan untuk mendapat kouta 30% menunjukkan bahwa masih ada hambatan yang dialami calon legislatif perempuan. Seperti masih kentalnya budaya patriarki yang seringkali mendiskriminasi perempuan. Bagi masyarakat Indonesia budaya patriarki masih dianggap sebagai suatu yang wajar karena budaya ini diwariskan secara turun temurun. Budaya patriarki ini kemudian semakin melegitimasi karena adanya dikotomi mengenai ruang publik dan privat. Dalam hal ini adanya anggapan bahwa perempuan hanya memiliki peran dalam ruang privat sedangkan politik dianggap sebagai ruang publik yang menunjukkan citra maskulinitas. Kemudian tidak adanya komitmen dari institusi politik pada pemberdayaan perempuan, pada saat rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi parpol karena parpol masih belum yakin terhadap kemampuan perempuan untuk menaikkan elektabilitas. Asumsi ini tentu berkaitan dengan keterbatasan perempuan dalam finansial maupun sosial.

Budaya politik yang terbentuk karena absennya kehadiran perempuan,

menyulitkan paraktek politik bagi perempuan dalam mendapat ruang yang sama dengan laki-laki. Atas kondisi tersebut diperlukan upaya untuk mendorong perempuan mengejar ketertinggalannya, agar perempuan mampu maju dan berkontestasi dalam pemilu membentuk pengalaman politik khas perempuan dan meraih posisi politik dengan diterapkannya *affirmative action* bagi perempuan melalui kouta gender. Partisipasi perempuan dalam dunia politik tidak saja dilakukan dengan memberikan suara tetapi juga dilakukan dengan cara perempuan mencalonkan dirinya dalam kancah politik. Selama ini jumlah keterlibatan perempuan di dunia politik memang menunjukkan progres yang menggembirakan, tetapi kondisinya tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Jika media massa tetap memberikan liputan yang mendukung peran perempuan. Hasil liputan media tentu saja mempengaruhi cara pandang dan sikap masyarakat terhadap perempuan yang akan maju, dan tentu akan mempengaruhi jumlah dukungan yang diperoleh perempuan untuk terpilih dan sukses dalam proses kandidasinya.

KESIMPULAN

Representasi politisi perempuan yang terdapat dalam program Mata Najwa di Trans 7 episode “Politik Perempuan” tidak lepas dari ideologi dominan yaitu kesetaraan gender dan kepemimpinan perempuan yang direpresentasikan melalui narasumber yang hadir dalam program tersebut. Selain itu politisi perempuan ditampilkan sebagai komunikator politik yang andal dengan visi misi yang cerdas dan memikat. Mata Najwa pun telah menyajikan tayangan dengan narasi konten gender yang positif dengan demikian tayangan ini telah mendukung terciptanya ideologi jurnalisme sensitif gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardani, Pinastika Intar. (2016). *Konstruksi Media Terhadap Sosok Legislator Perempuan Analisis Framing Pemberitaan Mengenai Peran Legislator Perempuan DPR RI Periode 2009 – 2014 Pada Harian Kompas*, Skripsi, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arivia, Gadis. (2006). *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, Cet I; Jakarta: Kompas.
- Erry, Hadiati., Abdullah, Irwan., Udasworo, Wening. (2013). Konstruksi Media dalam Memberitakan Politisi Perempuan Yang Terlibat Kasus Korupsi, *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, Volume 2 No. 2 Hal: 11-24.
- Kompasiana.com, “Perempuan Dalam Perspektif Gender”, <http://www.kompasiana.com/mprasenja/perempuandalam-perspektif-gender550f05eca333111a52dba8528519>, Diakses pada 20 Januari 2019,
- Masykur, Riziq Abdurrahman.(2017). *Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Di Indonesia: Studi tentang Perolehan Suara Perempuan Partai PPP di Provinsi DKI Jakarta pada Pemilu 2014*, Skripsi, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah.
- Perdana, Putria. (2012). “*Suara Perempuan di Media Cetak Sebagai Komunikasi Politik*”, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Republika*, “Pers Indonesia Dinilai Masih Patriarki”, <https://republika.co.id/amp/mc0kww>, Diakses pada 1 November 2019
- Setiawan, Lucas Deni. (2014). *Televisi Dan Masyarakat Adat. Jurnal Ilmu Komunikasi*. Volume 11 No. 2, Hal: 165-178
- Soekanto, Soejoni. (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum: Analisis HAM* , Cet I; Jakarta, PT. Raja Rafindo Persada.
- Subiakto, Henry. (2012). *Komunikasi Politik, Media Dan Demokrasi*, Cet III; Jakarta: Prenada Media Group.
- Tirto.Id, “Keterwakilan Perempuan Dan Anak Muda di DPR 2019-2024”, <https://tirto.id/Bagaimana-Keterwakilan-Perempuan-Dan-Anak-Muda-Di-Dpr-2019-2024>, Diakses pada 1 November 2019.
- Walby, Sylvia. (2014). *Teorisasi Patriarki*. Yogyakarta: Jala Sutra
- Women Research Institute, “Keterwakilan perempuan di Parlemen”, https://www.wri.or.id/editorial/361-keterwakilan-perempuan-di-parlemen.html#.YNr_QOgzbDc. Diakses pada 2 November 2019.